

## DAFTAR REFRENSI

### **Buku :**

- Creswell, J. W. (2010). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dwidjowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono. (2016). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*. UNYPres.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Skripsi dan Jurnal :**

- Jamil, S. N. (2019). Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab X Tentang Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus BUMDes di Kecamatan Bahar Selatan).
- Wijaya, P. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Asahan.
- Annisa Dwi Lestari, Dadan Kurnia, A. S. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.
- Asep Suryadi, Budiman Rusli, M. B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.
- Bartholy A.S Lengo. (2021). Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes di Desa Wolotolo Kabupaten Ende.

Sidik, H. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari.

**Dokumen :**

Peraturan Bupati Bintan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/ Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Website :**

Rauf, T. (2018). Seluruh Desa di Kabupaten Bintan Miliki BUMDes di Tahun 2018.

